

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Stakeholder* membutuhkan laporan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya laporan keuangan. Laporan keuangan mencerminkan kinerja perusahaan di masa lalu, sekaligus menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan dikatakan baik apabila dapat dipahami, memiliki relevansi informasi masa lalu terhadap peramalan kinerja masa depan, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain, dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang tidak memenuhi unsur tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi pemangku kepentingan karena kesulitan untuk membangun perusahaan akibat keputusan yang diambil kurang tepat.

Tahun 1999 Indonesia memiliki pedoman *corporate governance* sebagai tanggapan atas terjadinya krisis ekonomi yang turut melanda Indonesia. Kinerja perusahaan Indonesia baik finansial maupun non finansial yang buruk dalam kurun waktu 1997-2002 menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia kedepan. Worldcom dan Enron semakin menyudutkan kredibilitas akuntan publik yang seharusnya menjadi penengah perusahaan dan eksternal. Kasus tersebut menggerakkan BAPEPAM (kini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) untuk menjadikan komite audit sebagai alat yang vital dalam

pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik. Banyaknya kasus *white-collar crime* menjadikan BAPEPAM pada waktu itu merevisi peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kualitas audit (Kontan, 2011).

Beberapa revisi peraturan keputusan ketua BAPEPAM dan LK tahun 2004 dengan tahun 2011 terletak pada pasal 1 ayat c yang berisi tindakan komite audit yang harus independen. Selain itu pada peraturan tahun 2012 komite audit diberi wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tanggung jawab komite audit. Saat ini peraturan OJK mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menggunakan peraturan terbaru dengan nomor 55/POJK.04/2015.

Komite audit muncul sebagai alat bantu perusahaan dalam melakukan praktek *Good Corporate Governance* (GCG). Komite audit bertanggungjawab pada pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria, termasuk juga dalam hal pelaporan yang lengkap. Selain itu komite audit bertugas juga dalam menangani resiko dan kontrol perusahaan, sekaligus melakukan pengawasan yang independen terhadap GCG.

Komite audit akan membantu auditor eksternal dalam melakukan tugasnya. Komite audit bertugas sebagai jembatan antara auditor eksternal dan manajemen perusahaan, dan menciptakan atmosfer dimana auditor

eksternal menguatkan informasi yang disediakan oleh manajemen (Rani, 2018). Komite audit akan memberikan auditor eksternal suatu ruang komunikasi dalam membantu penyelesaian permasalahan di dalam perusahaan. Komunikasi yang terjalin dengan intim antara audit eksternal dan manajemen akan menghasilkan kelancaran arus informasi yang akan mengurangi asimetri informasi.

Kebutuhan akan laporan yang telah diaudit menjadikan perusahaan mempersiapkan dana untuk *fee* audit. Menurut Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, *fee* audit telah ditentukan berdasarkan batas bawah, dengan begitu *fee* audit akan meningkat sesuai dengan banyaknya jam kerja anggota yang digunakan akibat prosedur-prosedur audit yang lebih banyak dilakukan. Semakin banyak prosedur yang dilakukan akan meningkatkan jumlah jam kerja, sehingga *fee* audit akan meningkat. *Fee* audit ditentukan dari proses tawar-menawar antara klien dan KAP. Proses tersebut riskan terjadi sikap pengurangan biaya dengan cara mengurangi pemeriksaan oleh KAP supaya dipilih oleh klien, tanpa memperhatikan resiko perusahaan.

Penelitian Andriani dan Nursiam tahun 2017 menyatakan bahwa *fee* audit yang tinggi dapat menjadi indikator kualitas audit yang baik. Komite audit akan mengawasi proses pelaporan keuangan dengan seksama, menjadikan auditor dapat melakukan prosedur dengan baik dan menurunkan resiko kontrol sehingga dapat mengurangi usaha auditor dalam penyesuaian resiko audit dan mengurangi *fee* audit tanpa

mengurangi kualitas penilaian. Penelitian Rani (2018) dan Ardianingsih (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan yang positif terhadap *fee* audit. Namun menurut Zaman, Hudaib dan Haniffa (2011) ukuran komite memiliki pengaruh yang negatif terhadap *fee* audit, dengan alasan bahwa ukuran komite audit yang besar akan memudahkan perusahaan menemukan potensi masalah perusahaan sehingga peran *monitoring* komite audit menjadi bertambah.

Penelitian Wedari (2015), Sukaniasih & Tenaya (2016), Zaman, Hudaib & Hanifa (2011) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit. Stewart dan Munro (2007) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *fee* audit. Komite audit yang kerap mengadakan rapat memiliki *fee* audit yang rendah karena komite audit mengurangi resiko audit.

Penelitian Goodwin-Stewart & Kent (2006) dan Kibiya, Che Ahmad & Umar (2016) menyatakan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit dengan alasan komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi akan memahami resiko yang terjadi di dalam perusahaan sehingga meminta level asurans yang lebih tinggi dengan menyetujui dilakukannya banyak pengujian sehingga mengakibatkan biaya audit menjadi lebih tinggi. Rani (2018) menemukan hasil bahwa komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi dan keuangan dalam bidang tersebut akan memeriksa masalah yang mungkin terjadi dibanding yang kurang memiliki keahlian tersebut, sehingga dapat

menangani sendiri permasalahan yang terjadi pada perusahaan dan akhirnya akan mengurangi beban kerja auditor untuk memeriksa laporan dan mendapatkan biaya audit yang lebih rendah.

Stewart dan Munro (2007) menyatakan bahwa tingkat kehadiran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *fee* audit karena kehadiran komite audit yang tinggi akan mengurangi resiko audit. Namun penelitian Anderson, Mansi, dan Reeb (2004) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kehadiran komite audit dalam rapat, maka *fee* audit akan meningkat karena komite audit akan meminta kualitas audit yang lebih tinggi.

Penelitian ini mereplikasi penelitian milik Rani (2018) yang meneliti karakteristik komite audit perusahaan India yang tergabung dalam indeks S&P BSE pada *fee* audit. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengurangi variabel independensi karena menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 kriteria komite audit salah satunya adalah harus independen, antara lain bukan merupakan orang yang memberikan jasa asuransi dan non asuransi pada perusahaan, bukan orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan perusahaan, dan tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan (pasal 7f,g,h), sehingga penulis menganggap seluruh anggota komite audit juga merupakan pihak independen.

Penelitian ini juga mengubah pengukuran keahlian komite audit menjadi berfokus pada ketua komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi dan/atau keuangan. Hal ini terjadi karena belum ada penelitian yang melihat ketua komite audit sebagai ahli keuangan dan akuntansi di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa komite audit yang memiliki ketua yang ahli akuntansi dan/atau keuangan akan lebih memiliki kuasa untuk mengendalikan tugas-tugas mereka. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda, yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit?
2. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit?
3. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit?
4. Apakah tingkat kehadiran komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit?

#### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Meneliti pengaruh ukuran komite audit terhadap *fee* audit.
2. Meneliti pengaruh frekuensi rapat komite terhadap *fee* audit.
3. Meneliti pengaruh keahlian komite audit terhadap *fee* audit.
4. Meneliti pengaruh tingkat kehadiran komite audit terhadap *fee* audit.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi:

##### 1. Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi komite audit untuk menentukan langkah dalam menekan *fee* audit agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

##### 2. Regulator

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi regulator agar dapat memberikan kebijakan yang meningkatkan kinerja komite audit sehingga menjadi lebih baik dan perusahaan dapat membayar *fee* audit yang sesuai dengan kualitas tanpa mengurangi kualitas audit.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

##### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi tentang sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

##### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi penjelasan teori dan variabel penelitian berupa pengertian dan definisi yang diambil dari buku dan sumber penelitian

lain yang memiliki hubungan dengan penelitian, serta pengembangan hipotesis.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi pengukuran variabel dependen, independen, dan kontrol serta penjelasan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, serta penjelasan singkat mengenai pengujian yang dilakukan.

### 4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab keempat berisi analisis deskriptif variabel penelitian dan analisis pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat yang telah dipilih.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian yang berkaitan dengan analisa berdasarkan data yang telah diuraikan.